



BUPATI KEPULAUAN YAPEN
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung pada setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220.);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 Nomor 03)
11. Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Waropen Nomor 116 Tahun 2002 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa menjadi Kampung dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2002 Nomor 104).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
4. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
6. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi Papua, dan inspektorat daerah kabupaten Kepulauan Yapen

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung pada setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan pada 160 Kampung berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afiriasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afiriasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afiriasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Kampung.
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus :

$$AA \text{ Kampung} = (0,03 \times DK) // \{2 \times KST + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Kampung = Alokasi Afiriasi setiap Kampung

DK = Dana Kampung

KST = Jumlah Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

KT = Jumlah kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada kampung-kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan kampung, pengelolaan Dana Kampung, capaian keluaran (output) Dana Kampung, dan capaian hasil (outcome) pembangunan kampung.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan kampung dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAK (Pendapatan Asli Kampung) terhadap total pendapatan APBK dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBK.
- (2) Pengelolaan dana kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana kampung terhadap total dana kampung dan persentase pengadaan barang jasa dana kampung secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana kampung dan persentase capaian output dana kampung.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\}$$

* AF Kab/Kota

Keterangan:

- AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung kabupaten
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung kabupaten
Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung kabupaten
Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung kabupaten
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk seluruh Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Kampung Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa peraturan Kampung mengenai APBK;
 - b. Tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya ;dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung Tahap I menunjukkan rata - rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata -rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata- rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa peraturan Kampung mengenai APBK;
 - b. Tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya ;dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung Tahap I menunjukkan rata - rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata -rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); dan
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala Kampung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (6) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) .
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung setiap minggu.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Kampung dapat menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kampung.

- (2) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Kampung yang ditetapkan oleh menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- (3) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APBK.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan permintaan penundaan penyaluran Dana Kampung kepada Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau ayat (2) dari Kepala Kampung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran;

- b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUN.
- (5) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (1) Bupati dapat meminta penyaluran kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasa ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
- (8) terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 17

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUN.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Kampung di RKK; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Kampung.

Pasal 19

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKK, bupati :

- a. meminta penjelasan kepada kepala Kampung mengenai sisa Dana Kampung di RKK tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kepala Kampung melakukan penyalahgunaan Dana Kampung dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Kampung ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.

- (4) Penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Kampung tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Kampung tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Kampung yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Kampung yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Ditetapkan di S E R U I
pada tanggal 13 Januari 2020


BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
TONNY TESAR

Diundangkan di S E R U I
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
CAP/TTD
ALEXANDER NUSSY

Salinan Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;
4. Para Kepala Kampung Se- Kabupaten Kepulauan Yapen masing-masing di Serui ;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SONNY NH, SH
PENATA TK. I
NIP. 19781211 200605 1 001

Lampiran I Peraturan Bupati Kepulauan Yapen

Nomor : 3 TAHUN 2020

Tanggal 15 JANUARI 2020

Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung pada
di Kabupaten Kepulauan Yapen T.A 2020

**DAFTAR PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG PADA KAMPUNG
DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020**

| No. | Distrik | Nama Kampung | Alokasi Dasar | Klasifikasi Desa IDM | Alokasi Afirmasi | Alokasi Kinerja | Alokasi Formula | Pagu Dana Kampung |
|-----|---------------|--------------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) = (4) + (6) + (7) + (8) |
| 1 | Yapen Selatan | 1 Serui Laut | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 148,243,000 | 811,049,000 |
| | | 2 Banawa | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 221,247,000 | 884,053,000 |
| | | 3 Turu | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 131,625,000 | 794,431,000 |
| | | 4 Pasir Hitam | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 243,089,000 | 905,895,000 |
| | | 5 Pasir Putih | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 208,685,000 | 871,491,000 |
| | | 6 Manaini | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 115,991,000 | 778,797,000 |
| | | 7 Imandoa | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 86,176,000 | 748,982,000 |
| | | 8 Barawaikap | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 154,077,000 | 816,883,000 |
| | | 9 Bawai | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 173,117,000 | 835,923,000 |
| | | 10 Nundawipi | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 123,850,000 | 786,656,000 |
| 2 | Yapen Barat | 11 Webi | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 416,750,000 | 1,079,556,000 |
| | | 12 Papuama | 662,806,000 | Tertinggal | 181,634,000 | - | 609,592,000 | 1,454,032,000 |
| | | 13 Kairawi | 662,806,000 | Tertinggal | 181,634,000 | - | 292,730,000 | 1,137,170,000 |
| | | 14 Natabui | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 405,176,000 | 1,067,982,000 |
| | | 15 Warabori | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 212,946,000 | 875,752,000 |
| | | 16 Wimoni | 662,806,000 | Tertinggal | 181,634,000 | - | 581,747,000 | 1,426,187,000 |
| | | 17 Sasawa | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 124,436,000 | 787,242,000 |
| | | 18 Inowa | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 263,102,000 | 925,908,000 |
| | | 19 Maniri | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | 363,269,000 | - | 360,376,000 | 1,386,451,000 |
| | | 20 Nuiwiora | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 209,237,000 | 872,043,000 |
| | | 21 Yenui Marau | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 237,310,000 | 900,116,000 |
| | | 22 Marau | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 241,492,000 | 904,298,000 |
| | | 23 Toweta | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 222,774,000 | 885,580,000 |
| | | 24 Woiwani | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | 363,269,000 | - | 347,342,000 | 1,373,417,000 |
| | | 25 Yarori | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 247,058,000 | 909,864,000 |
| | | 26 Narei | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 150,444,000 | 813,250,000 |
| 3 | Yapen Timur | 27 Korombobi | 662,806,000 | Tertinggal | - | 144,096,000 | 165,100,000 | 972,002,000 |
| | | 28 Dawai | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 232,041,000 | 894,847,000 |
| | | 29 Wabo | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 134,388,000 | 797,194,000 |
| | | 30 Nunsembai | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 131,395,000 | 794,201,000 |
| | | 31 Nunsiri | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 385,252,000 | 1,048,058,000 |
| | | 32 Woinsupi | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 171,398,000 | 834,204,000 |
| | | 33 Awunawai | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 223,249,000 | 886,055,000 |
| | | 34 Mareruni | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 80,305,000 | 743,111,000 |
| | | 35 Wabompi | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 82,141,000 | 744,947,000 |
| | | 36 Duai | 662,806,000 | Tertinggal | - | 144,096,000 | 162,719,000 | 969,621,000 |
| | | 37 Sere Sere | 662,806,000 | Tertinggal | - | 144,096,000 | 186,002,000 | 992,904,000 |
| 4 | Angkaisera | 38 Menawi | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 353,827,000 | 1,016,633,000 |
| | | 39 Wadapi | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 192,437,000 | 855,243,000 |
| | | 40 Kainui I | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 202,859,000 | 865,665,000 |
| | | 41 Aitiri | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 225,301,000 | 888,107,000 |
| | | 42 Wawuti | 662,806,000 | Berkembang | - | 144,096,000 | 160,095,000 | 966,997,000 |
| | | 43 Roiipi | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 239,408,000 | 902,214,000 |
| | | 44 Ransamoni | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 215,914,000 | 878,720,000 |
| | | 45 Kainui II | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 229,864,000 | 892,670,000 |
| | | 46 Wanampompi | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 133,234,000 | 796,040,000 |
| | | 47 Manenayam | 662,806,000 | Tertinggal | - | 144,096,000 | 114,672,000 | 921,574,000 |
| | | 48 Roiipi Dua | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 138,533,000 | 801,339,000 |
| 5 | Poom | 49 Poom I | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 222,525,000 | 885,331,000 |
| | | 50 Serewen | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 173,307,000 | 836,113,000 |
| | | 51 Poom II | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 561,573,000 | 1,224,379,000 |
| | | 52 Mokiroan | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 114,500,000 | 777,306,000 |
| | | 53 Rarisi | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 186,178,000 | 848,984,000 |
| | | 54 Warioi | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 121,017,000 | 783,823,000 |
| | | 55 Humbe Awai | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 152,415,000 | 815,221,000 |
| | | 56 Nurawi | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 129,901,000 | 792,707,000 |
| 6 | Kosiwo | 57 Kamanap | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 115,323,000 | 778,129,000 |
| | | 58 Aromarea | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 134,438,000 | 797,244,000 |
| | | 59 Maria Rotu | 662,806,000 | Tertinggal | - | 144,096,000 | 136,052,000 | 942,954,000 |
| | | 60 Kanawa | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 114,137,000 | 776,943,000 |
| | | 61 Tatui | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 228,627,000 | 891,433,000 |
| | | 62 Arieipi | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 90,585,000 | 753,391,000 |
| | | 63 Sarawandori | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 87,260,000 | 750,066,000 |
| | | 64 Ambaidiru | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 198,098,000 | 860,904,000 |
| | | 65 Mambo | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 123,307,000 | 786,113,000 |
| | | 66 Manainin | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 112,046,000 | 774,852,000 |
| | | 67 Numaman | 662,806,000 | Berkembang | - | 144,096,000 | 145,159,000 | 952,061,000 |
| | | 68 Ramangkurani | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 206,108,000 | 868,914,000 |
| | | 69 Sarawandori Dua | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 140,147,000 | 802,953,000 |
| | | 70 Arieipi Dua | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 130,304,000 | 793,110,000 |
| | | 71 Panduami | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 120,677,000 | 783,483,000 |
| 7 | Yapen Utara | 72 Tindaret | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 214,486,000 | 877,292,000 |
| | | 73 Yobi | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 204,523,000 | 867,329,000 |
| | | 74 Sambrawai | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 206,933,000 | 869,739,000 |
| | | 75 Kiriyou | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 209,129,000 | 871,935,000 |
| | | 76 Soromasen | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 158,258,000 | 821,064,000 |
| | | 77 Roswari | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 216,079,000 | 878,885,000 |
| | | 78 Doreimanona | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 153,430,000 | 816,236,000 |
| 8 | Raimbawi | 79 Waindu | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 206,579,000 | 869,385,000 |
| | | 80 Barawai | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 165,739,000 | 828,545,000 |
| | | 81 Woda | 662,806,000 | Berkembang | - | 144,096,000 | 162,300,000 | 969,202,000 |
| | | 82 Kororompui | 662,806,000 | Tertinggal | - | 144,096,000 | 192,637,000 | 999,539,000 |
| | | 83 Aisau | 662,806,000 | Tertinggal | - | 144,096,000 | 120,554,000 | 927,456,000 |
| | | 84 Sewenui | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 166,520,000 | 829,326,000 |
| | | 85 Sawendui | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 144,428,000 | 807,234,000 |
| 9 | Teluk Ampimoi | 86 Randawaya | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 219,653,000 | 882,459,000 |
| | | 87 Warironi | 662,806,000 | Tertinggal | 181,634,000 | - | 298,465,000 | 1,142,905,000 |

| No. | Distrik | Nama Kampung | Alokasi Dasar | Klasifikasi Desa IDM | Alokasi Afiriasi | Alokasi Kinerja | Alokasi Formula | Pagu Dana Kampung |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) = (4) + (6) + (7) + (8) |
| | | 88 Ampimoi | 662,806,000 | Tertinggal | 181,634,000 | - | 301,681,000 | 1,146,121,000 |
| | | 89 Waita | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 243,055,000 | 905,861,000 |
| | | 90 Ayari | 662,806,000 | Tertinggal | 181,634,000 | - | 269,170,000 | 1,113,610,000 |
| | | 91 Koroapi | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 168,749,000 | 831,555,000 |
| | | 92 Wabuayar | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 150,000,000 | 812,806,000 |
| | | 93 Tarei | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 162,841,000 | 825,647,000 |
| | | 94 Bareraif | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 119,865,000 | 782,671,000 |
| | | 95 Arareni | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 131,890,000 | 794,696,000 |
| | | 96 Siromi | 662,806,000 | Tertinggal | - | 144,096,000 | 189,827,000 | 996,729,000 |
| 10 | Kepulauan Ambai | 97 Ambai I | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 222,381,000 | 885,187,000 |
| | | 98 Saweru | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 180,131,000 | 842,937,000 |
| | | 99 Kawipi | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 184,909,000 | 847,715,000 |
| | | 100 Wamori | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 198,919,000 | 861,725,000 |
| | | 101 Adiwipi | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 178,858,000 | 841,664,000 |
| | | 102 Umani | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 209,473,000 | 872,279,000 |
| | | 103 Ambai II | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 169,046,000 | 831,852,000 |
| | | 104 Mambawi | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 143,274,000 | 806,080,000 |
| | | 105 Baisore | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 161,785,000 | 824,591,000 |
| | | 106 Rondepi | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 219,006,000 | 881,812,000 |
| | | 107 Dorau | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 161,929,000 | 824,735,000 |
| | | 108 Perea | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 135,831,000 | 798,637,000 |
| | | 109 Imboriawa | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 157,700,000 | 820,506,000 |
| | | 110 Bairei | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 129,966,000 | 792,772,000 |
| | | 111 Aiweragani | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 171,991,000 | 834,797,000 |
| | | 112 Toroa | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 164,666,000 | 827,472,000 |
| | | 113 Nuniandei | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 139,802,000 | 802,608,000 |
| | | 114 Marawi | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 140,058,000 | 802,864,000 |
| 11 | Wonawa | 115 Wooli | 662,806,000 | Tertinggal | - | 144,096,000 | 221,713,000 | 1,028,615,000 |
| | | 116 Woinap | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 233,817,000 | 896,623,000 |
| | | 117 Aibondeni | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 159,291,000 | 822,097,000 |
| | | 118 Kanaki | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 208,747,000 | 871,553,000 |
| | | 119 Dumani | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 252,290,000 | 915,096,000 |
| | | 120 Karemoni | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 288,484,000 | 951,290,000 |
| | | 121 Haihorei | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 308,454,000 | 971,260,000 |
| | | 122 Rembai | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 226,630,000 | 889,436,000 |
| | | 123 Jaimaria | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 146,367,000 | 809,173,000 |
| | | 124 Awado | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 156,879,000 | 819,685,000 |
| 12 | Windesi | 125 Kaonda | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 129,744,000 | 792,550,000 |
| | | 126 Windesi | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 187,300,000 | 850,106,000 |
| | | 127 Munggui | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 172,847,000 | 835,653,000 |
| | | 128 Karawi | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 229,282,000 | 892,088,000 |
| | | 129 Asai | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 164,408,000 | 827,214,000 |
| | | 130 Roseborei | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 123,084,000 | 785,890,000 |
| | | 131 Waisani | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | 363,269,000 | - | 256,427,000 | 1,282,502,000 |
| | | 132 Saruman | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 160,760,000 | 823,566,000 |
| | | 133 Aryobu | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 130,580,000 | 793,386,000 |
| 13 | Pulau Kurudu | 134 Kaipuri | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 148,487,000 | 811,293,000 |
| | | 135 Doreianmini | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 138,021,000 | 800,827,000 |
| | | 136 Andersaria | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 158,736,000 | 821,542,000 |
| | | 137 Kurudu | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 121,708,000 | 784,514,000 |
| | | 138 Kirimri | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 147,276,000 | 810,082,000 |
| | | 139 Manusundu | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 167,211,000 | 830,017,000 |
| | | 140 Mnuqwar | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 99,459,000 | 762,265,000 |
| | | 141 Mansesi | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 125,918,000 | 788,724,000 |
| 14 | Pulau Yerui | 142 Miosnum | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 112,215,000 | 775,021,000 |
| | | 143 Jeniari | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 113,935,000 | 776,741,000 |
| | | 144 Umpeki | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 93,028,000 | 755,834,000 |
| | | 145 Auseri | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 98,666,000 | 761,472,000 |
| | | 146 Yeiuarau | 662,806,000 | Tertinggal | - | 144,096,000 | 111,740,000 | 918,642,000 |
| 15 | Anotaurei | 147 Ketu Api | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 109,790,000 | 772,596,000 |
| | | 148 Mariaderi | 662,806,000 | Berkembang | - | - | 175,510,000 | 838,316,000 |
| | | 149 Yapan | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 242,335,000 | 905,141,000 |
| | | 150 Mantembu | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | - | - | 129,166,000 | 791,972,000 |
| | | 151 Famboaman | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 168,873,000 | 831,679,000 |
| | | 152 Kandowarira | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 114,211,000 | 777,017,000 |
| | | 153 Warari | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 176,199,000 | 839,005,000 |
| 16 | Yawakukat | 154 Kontinuai | 662,806,000 | Tertinggal | - | 144,096,000 | 168,588,000 | 975,490,000 |
| | | 155 Woniwon | 662,806,000 | Tertinggal | - | 144,096,000 | 132,637,000 | 939,539,000 |
| | | 156 Sanayoka | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 149,674,000 | 812,480,000 |
| | | 157 Rambai | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 191,077,000 | 853,883,000 |
| | | 158 Yafanani | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 133,831,000 | 796,637,000 |
| | | 159 Borai | 662,806,000 | Tertinggal | - | 144,096,000 | 162,732,000 | 969,634,000 |
| | | 160 Kabuagna | 662,806,000 | Tertinggal | - | - | 188,295,000 | 851,101,000 |
| Total | | | 106,048,960,000 | Tertinggal | 2,179,611,000 | 2,305,536,000 | 29,915,368,000 | 140,449,475,000 |



BUPATI KEPULAUAN YAPEN
CAP/TTD
TONNY TESAR